

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit sebagai salah satu implementor kebijakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Kota Semarang masih belum dapat memaksimalkan berjalannya program tersebut. Jika dilihat dari teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, yang memiliki empat indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi serta Struktur Birokrasi, Implementasi program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit belum dapat dikatakan berhasil karena belum memenuhi semua indikator yang ada.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan harus menjamin pemerataan cakupan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, baik itu pekerja sektor formal maupun pekerja sektor informal. Namun jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis implementasi program jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Kota Semarang masih belum merata. Hal yang menjadi kendala utama dari implementasi program jaminan sosial ini adalah komunikasi antara para implementor kebijakan dengan masyarakat, serta masih kurangnya

sumberdaya anggaran yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan angka kepesertaan pekerja informal.

Hal yang menjadi kendala utama dari implementasi program jaminan sosial ini adalah komunikasi antara para implementor kebijakan dengan masyarakat, serta masih kurangnya sumberdaya anggaran yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan angka kepesertaan pekerja informal, tidak terdapat informasi detail terkait jumlah kekurangan anggaran yang disebutkan menunjukkan tidak adanya transparansi dari pihak implementor kebijakan terkait detail rincian kekurangannya tersebut.

Masih belum terlaksana dengan baiknya indikator komunikasi dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan jumlah kepesertaan pekerja sektor informal masih kurang efektif, karena belum berhasil merubah pola pikir masyarakat terhadap pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlu adanya peningkatan sosialisasi baik itu dari segi kualitas sosialisasinya maupun, dari banyaknya jumlah sosialisasi yang dilakukakan. Hal terserbut karena dengan masih belum mencapainya target jumlah kepesertaan tenaga kerja informal sudah memperlihatkan secara jelas bahwa sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif.

Masih belum berhasilnya sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan jumlah kepesertaan juga dapat dilihat dari belum dapat mencapai target kepesertaan jumlah tenaga kerja informal yang ditentukan atau dapat dikatakan masih belum maksimal berjalannya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal adalah komunikasi yang berupa sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil karena belum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, selain itu terdapat pula kendala seperti tingkat edukasi masyarakat terhadap program tersebut, kurangnya anggaran dalam melakukan upaya sosialisasi, dan rendahnya tingkat kemampuan ekonomi para pekerja sektor informal masih menjadi kendala utama berjalannya program ini.

Perlu adanya upaya lebih serius maupun berjalannya sinergi yang baik antara semua lembaga yang terkait untuk mendorong kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena tingkat kesadaran dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan masih sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa tidak membutuhkan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu diperhatikan saran sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit selaku salah satu pengelola implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang harus lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi terkait dengan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan baik bagi pekerja sektor formal maupun sektor informal.

Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah terkait meratanya penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat tercapai.

2. Perlu adanya inovasi dalam melakukakn sosialisasi untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlunya inovasi dalam sosialisasi karena, sejauh ini sosialisasi yang dilakukan belum dapat merubah pola pikir masyarakat terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Perlu adanya peningkatan besaran anggaran demi memaksimalkan kembali implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di setiap cabang BPJS Ketenagakerjaan.